

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal, dan Internet

Abdelal, Rawi, *National Purpose in the World Economy: Post—Soviet States In Comparative Perspective* (2001)

Aidit, D.N. et al., *PKI Korban Perang Dingin (Sejarah Peristiwa Madiun 1948)* (2001).

Amin, S.M. *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin* (1967)

Anderson, Benedict, *Komunitas-Komunitas Imajiner: Renungan Tentang Asal-Usul Dan Penyebaran Nasionalisme* (1999)

Ankersen, Tom, "Tierra y Libertad: The Social Function Doctrine and Land Reform In Latin America" dalam http://www.law.ufl.edu/cgr/conference/06confmaterials/8_Panel/8_TomAnkersen-powerpoint.pdf (diakses tanggal 7 Oktober 2009)

Anwar, Rosihan, *Soebadio Sastrosatomo Pengemban Misi Politik* (1995)

Azhari, Aidul Fitriadi, *Menemukan Demokrasi* (2004).

Azhari, Aidul Fitriadi, 'Penafsiran Konstitusi dan Implikasinya terhadap Pembentukan Sistem Ketatanegaraan Demokrasi atau Otokrasi' (Dissertation of Doctor in Legal Science in Law Faculty of University of Indonesia, 6 August 2005)

Barkun, Michael, 'Law and Social Revolution: Millenarianism and the Legal System' (1971) 6 *Law & Society Review*

Beirne, Piers and Alan Hunt, 'Law and the Constitution of Soviet Society: The Case of Comrade Lenin' (1988) 22 *Law & Society Review*.

Berckmans, Paul, "The Semantics of Symbolic Speech" (1997) 16 *Law and Philosophy*.

Berman, Harold J., *Law and Revolution The Formation of the Western Legal Tradition* (1983).

Black, Donald J., "The Mobilization of Law" (1973) 2 *The Journal Of Legal Studies*.

Brenner, Y.S., *Theories of Economic Development And Growth*, London: George Allen & Unwin, 1969

Cotterrell, Roger, *The Sociology of Law An Introduction* (2nd ed, 1992).

- Crouch, Harold, *The Army and Politics Indonesia* (1978)
- Effendi, Djohan dan Abdul Hadi WM, *Iqbal Pemikir Sosial Islam Dan Sajak-Sajaknya* (1986).
- Feith, Herbert & Lance Castles (eds.), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* (1995)
- Freeman, M.D.A., *Lloyd's Introduction to Jurissprudence* (7th ed, 2001).
- Furnivall, J.S., *Netherlands India: A Study of Plural Economy* (1976).
- Hagopian, Mark N., *Regimes, Movements, and Ideologies*, Longman: New York/London, 1978
- Hatta, Mohammad, *Demokrasi Kita* (2004).
- Higgins, Benjamin, "Thought and Action: Indonesian Economic Studies and Policies in the 1950s." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 26, 1 (1990)
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia* (1994)
- Kahin, George McTurnan, *Nationalism and Revolution In Indonesia* (1952)
- Kahin, George McTurnan (ed), *Governments and Politics of Southeast Asia* (2nd ed, 1967)
- Kuntowijoyo, *Periodesasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Ummat Islam* (2001)
- Kusuma, A.B., *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945* (2004).
- Legge, J.D., *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan* (2003)
- Lindblad, J. Thomas, *From Java Bank to Bank Indonesia A Case Study of Indonesianisasi in Practice*, <http://www.indie-indonesie.nl/content/documents/paperseconomic%20side/MakalahThomas%20Lindblad.pdf> (diakses 22 Oktober 2009)
- Loomba, Ania, *Kolonialisme / Pascakolonialisme* (2003).
- Malaka, Tan, *Aksi Massa* (2008)
- Malaka, Tan, *Semangat Muda* (2007)
- Malaka, Tan, *Naar de "Republiek Indonesia" (Menuju Republik Indonesia)* (1987)

- Marzuki, Laica, 'Perubahan UUD NRI Tahun 1945: Sebuah Reformasi Konstitusi' (Paper presented at the Discussion Forum on "Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi", Surakarta, 17 March 2007).
- Massell, Gregory J., "Law as an Instrument of Revolutionary Change in a Traditional Milieu: The Case of Soviet Central Asia," dalam 2 *Law And Society Review* (1968)
- Muhono, *Ketetapan MPRS dan Peraturan Negara Yang Penting Bagi Anggauta Angkatan Bersenjata* (1966)
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia* (1995).
- Owen, Norman G. (ed.), *The Emergence of Modern Southeast Asia* (2005)
- Paton, George Whitecross, *A Textbook of Jurisprudence* (1951)
- Pound, Roscoe, *An Introduction to the Philosophy of Law* (1999)
- Pound, Roscoe, *Social Control Through Law* (1997)
- Rambe, Safrizal, *Sarekat Islam Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia* (2008).
- Said, Mohammad, *Pedoman Untuk Melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat Jilid I-A* (1961)
- Sarbini_Sumawinata, http://id.wikipedia.org/wiki/Sarbini_Sumawinata (Diakses tanggal 23 Oktober 2009)
- Simorangkir, J.C.T., *Penetapan UUD Dilihat Dari Segi Hukum Tata Negara Indonesia* (1984).
- Singadimedjo, Kasman, *Hidup Itu Berjuang* (1982)
- Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi* (1965)
- Soesatro, Hadi, dkk (ed) *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir Buku I 1945-1959 Membangun Ekonomi Indonesia* (2005)
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia* (1994)
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional* (1988).
- Stone, Julius, *Human Law and Human Justice* (1965)
- Taylor, Alastair M., *Indonesian Independence and The United Nations*, (1960)

Tempo edisi 17 Agustus 2008.

Wallerstein, Immanuel, "Development Lodestar or Illusion," dalam Leslie Sklair, *Capitalism and Development* (1994)

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia* (1994).

Wolhoff, G. J., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (1955)

Wrihatnolo, Randi R., "Sekilas Perencanaan Pembangunan di Indonesia 1948–2009", http://wrihatnolo.blogspot.com/2009_09_30_archive.html (diakses 16 Oktober 2009)

Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* (1960)

B. Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.

Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Daripada Haluan Negara (LNRI No. 138, 1960, tertanggal 19 November 1960)

Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969 (LNRI No. 152, 1960, tertanggal 3 Desember 1960, diumumkan 13 Desember 1960).

Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, tertanggal 21 Juni 1966.

Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, tertanggal 5 Juli 1966.

Ketetapan MPRS Nomor : XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, tertanggal 12 Maret 1967

Ketetapan MPR Nomor : II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Ketetapan MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Maklumat Wakil Presiden No. X, tertanggal 16 Oktober 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (LNRI tahun 1950, Nr 56; TLN Nr 37, Tahun 1950)

Undang-Undang Nomor 24 tahun 1952 tentang Nasionalisasi *De Javasche Bank N.V*

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional (LNRI No. 144, 1958)

Undang-Undang Nomor 85 Tahun 1958 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 (LNRI No. 161, Th. 1958, TLN No. 1689)

Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (LNRI No. 162, 1958; TLN No. 1690)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LNRI No. 104, 1960; TLN No. 2043)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank for Reconstruction and Development*) – (LNRI No. 10, 1966: TLN No. 2798)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Soal-soal Keuangan (LNRI No. 34, 1966);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*) – (LNRI No. 35, 1966);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank for Reconstruction and Development*) – (LNRI No. 36, 1966).

UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (LNRI No. 1, 1967; TLN No. 2818)

Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1959 tentang Dewan Perwakilan Rakyat (LNRI No.76, 1959; TLN 1815)

Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (LNRI No. 77, 1959, TLN No. 1816)

Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 tentang Dewan Pertimbangan Agung Sementara (LNRI No. 79, 1959, TLN No. 1817)

Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1959 tentang Perubahan dalam Undang-Undang No. 80 Tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 33 tahun 1950 tentang Pengumuman Dokumen-dokumen Konferensi Meja Bundar, tertanggal 21 Januari 1950 (LNRI 1950, Nr. 2).

Keputusan Presiden RIS Nomor 48 Tahun 1950 tentang Pengumuman Piagam Penandatanganan Konstitusi RIS dan Konstitusi RIS (LNRI 1950, Nr 3)

Keputusan Presiden RI No. 150 tahun 1959 tentang Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada UUD 1945 (LNRI No. 75, 1959).

Keputusan Dewan Pertimbangan Agung No. 3/Kpts/Sd/II/59, tertanggal 25 September 1959.

Keputusan DPA Nomor 4/Kpts/Sd/III/61 tentang Perincian Amanat Pembangunan Presiden, tertanggal 28 Agustus 1